RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI MONITORING PERIZINAN USAHA BERBASIS WEBSITE MENGGUNAKAN METODE PIECES

(Studi Kasus : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua)

Moh. R. Irjii Matdoan¹⁾
irjiimatdoan12@gmail.com

Rasna²⁾
razna.irji@gmail.com

Fajrin Noviansyah³⁾
ajrinnoviansyah@gmail.com

Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer dan Manajemen, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura¹⁾
Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Sistem Informasi, Universitas Yapis Papua^{2,3)}

Abstraksi - Proses pembuatan izin saat ini pihak perusahaan harus mengambil formulir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menanyakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan izin usaha berdasarkan bentuk perusahaan yang akan didirikan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang bangun sistem informasi monitoring perizinan usaha berbasis website. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode PIECES. Sistem informasi monitoring perizinan usaha akan dianalisis terhadap kinerja, informasi, ekonomi, pengendalian, efisiensi dan pelayanan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem dapat membantu pengguna dalam mengajukan perizinan dan membantu memonitoring data perizinan usaha yang telah diinputkan oleh pengguna.

Kata Kunci: sistem informasi, perizinan usaha, PIECES

1. PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan zaman yang diikuti dengan perkembangan teknologi canggih sekarang ini menimbulkan dampak positif bagi masyarakat terutama dibidang informasi dan komunikasi yang semakin canggih. Dalam dunia teknologi, komputer memegang peranan penting dalam dalam hal membantu dan memudahkan serta mendukung aktivitas dan produktifitas kinerja pegawai yang semakin meningkat, dengan adanya alat bantu seperti komputer maka proses pengolahan data dan penyimpanan data dapat terselesaikan dengan baik dan menghemat waktu serta tenaga pegawai, perusahaan-perusahaan dituntut untuk melakukan kegiatan oprasionalnya secara efektif dan efisien.

ISSN: 2338-1434

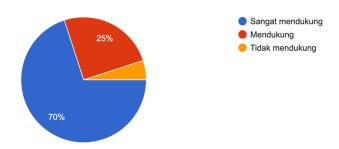
Sistem informasi perlu memberikan kemudahan dengan cepat dan akurat sehingga dapat memberikan kemudahanan[1]. Proses pembuatan izin saat ini pihak perusahaan harus mengambil formulir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan menanyakan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan izin usaha berdasarkan bentuk perusahaan yang akan didirikan. Setelah mendapatkan formulir perwakilan perusahaan harus mengisi dan melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti dokumen-dokumen atau identitas pembuatan usaha. Selain itu juga perusahaan kesulitan dalam mendapatkan informasi mengenai status dari proses pembuatan izin usaha, selama ini perusahaan hanya menunggu informasi melalui DPMPTSP atau datang langsung untuk mengetahui status pembuatan izin usaha hal ini tentunya akan mengurangi pelayanan terhadap perusahaan. Ditambah lagi perusahaan yang telah melakukan pembuatan izin terkadang lupa dengan batas waktu masa berlaku izin usaha yang mengakibatkan perusahaan dikenakan denda pada saat akan memperpanjang izin usaha. Penerapan sistem secara online membantu meningkatkan efisiensi kerja dan juga mengurangi ketergantungan kepada orang lain untuk mendapatkan data [2]. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menganalisis system adalah Pieces Framework dimana terdapat enam indikator yang terkait tentang *performance*, *information*, *control*, *efficiency*, *service* [3].

2. METODE PENELITIAN

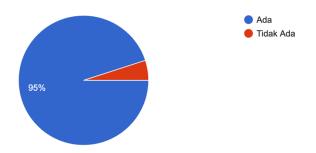
Untuk mendukung berjalannya penelitian maka dipergunakan observasi lapangan serta melakukan interview terhadap *stakeholder* yang ditemui di lapangan. Selain itu dengan menggunakan literature dari berbagai media. Untuk menganalisis data dari hasil observasi dipergunakan metode PIECES dimana dalam metode ini dapat dengan mudah menganalisa dari berbagai macam area mulai dari performance, information, economic, control, efficiency dan service[4].

a. Performance

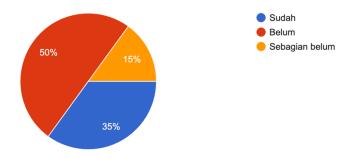
Apakah fungsi Sistem Informasi Monitoring Perizinan Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua mendukung semua hal? ²⁰ responses



Apakah ada dampak besar jika tidak diterapkan Sistem Informasi Monitoring Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua? ²⁰ responses

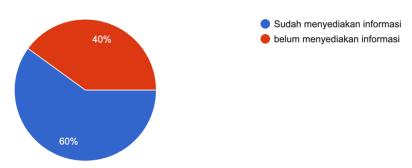


Apakah penyajian yang dihasilkan dalam Sistem Informasi Monitoring Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua sudah konsisten? ²⁰ responses

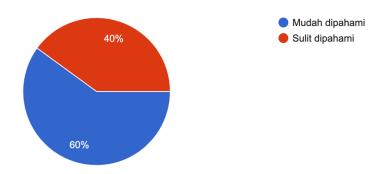


b. Information

Apakah Sistem Informasi Monitoring Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua sudah menyediakan informasi yang dibutuhkan? ²⁰ responses

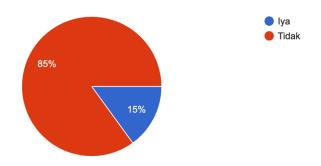


Apakah Sistem Informasi Monitoring Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua mudah dipahami? 20 responses

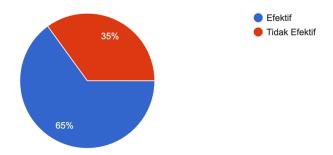


c. Economic

Apakah Sistem Informasi Monitoring Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua dapat meminimalisir pengeluaran organisasi? 20 responses

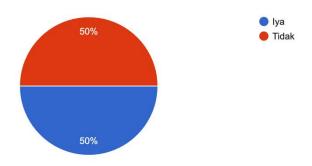


Adanya Sistem Informasi Monitoring Perizinan Usaha Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua apakah sudah efektif antara sumber daya waktu yang ada? ^{20 responses}



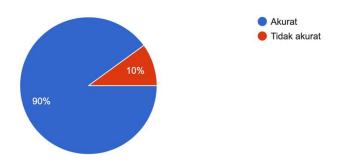
d. Control

Apakah mungkin terdapat data yang berbeda dalam satu database yang ada ? 20 responses

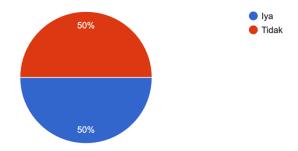


e. Efficiency

Apakah informasi yang dihasilkan sudah tepat waktu, akurat dan relevan? ^{20 responses}



Apakah usaha input yang dilakukan oleh admin sebanding dengan hasil/output? 20 responses



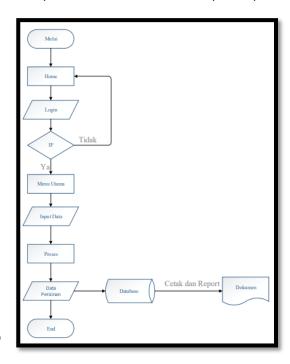
ISSN: 2338-1434

3. PERANCANGAN SISTEM

a. Analisis sistem yang sedang berjalan

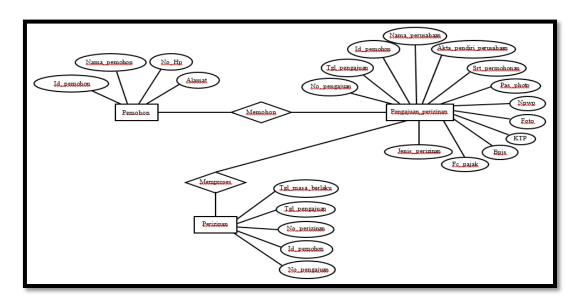
Dengan menganalisa *website* maka dapat diperoleh suatu informasi yang berguna bagi pemilik *website*[5]. Setelah melakukan pengamatan dan analisa pada DPMPTSP Provinsi Papua dapat

diketahui sistem yang sedang berjalan pada alur permohonan perizinan usaha di Provinsi Papua dapat dilihat pada Gambar 3.1. Pada Gambar 3.1 menjelaskan tahapan untuk melakukan pembuatan izin yang dimulai dari pemohon akan login kemudian setelah login pemohon akan masuk ke menu utama dan pemohon ke data perusahaan untuk menambahkan atau menginput data-data yang sebagai syarat-syarat untuk pembuatan izin usaha kemudian data tersebut akan di proses dan masuk ke data base agar bisa dicetak dan report dalam bentuk dokumen. Iin yang sudah dicetak kemudian pengarsipan permohonan dan penyerahan izin.



b. Perancangan *Entity Relationship Diagram* (ERD)

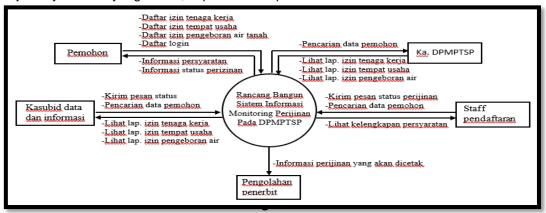
Diagram ERD menampilkan relasi antar entitas sebagai dasar dari implementasi *database* yang nantinya akan terdapat pada sistem yang dibangun, desain ERD seperti yang ditampilkan Gambar 3.2



Gambar 3.2 Diagram ERD

c. Diagram Konteks

Diagram konteks menggambarkan proses sistem informasi perizinan usaha yang menjelaskan alur proses sistem yang akan dibuat sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh user. Diagram konteks (level 0) 3 aktor pemohon, admin, pimpinan yang akan mendukung proses berjalannya sistem yang dibuat, seperti terlihat pada Gambar 3.3.



4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Tampilan halaman home

Implementasi interface halaman home merupakan halaman awal dari sistem informasi eksekutif perizinan usaha, yaitu terdapat pada Gambar 4.1



Gambar 4.1 Tampilan halaman home Sistem Informasi Perizinan DPMPTSP

b. Tampilan halaman beranda

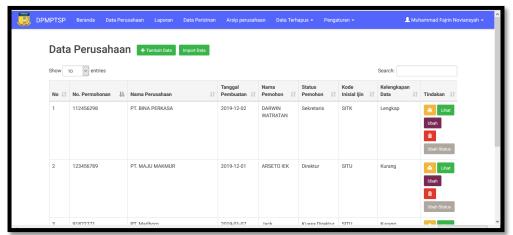
Implementasi interface halaman beranda merupakan halaman awal setelah berhasil login yaitu terdapat pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Tampilan halaman beranda Sistem Informasi Perizinan DPMPTSP

c. Tampilan halaman data perusahaan

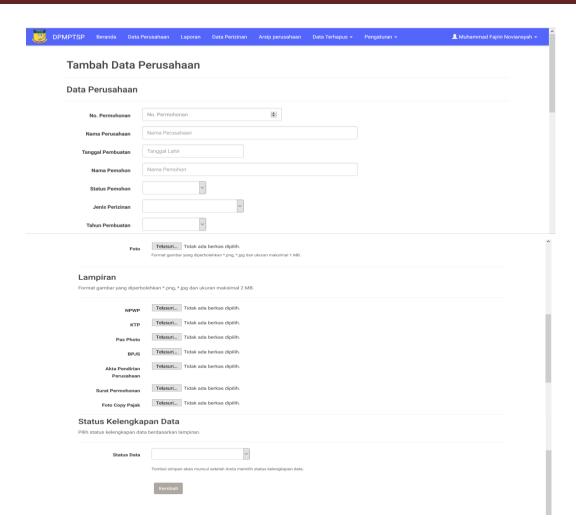
Implementasi interface halaman data perusahaan merupakan halaman untuk memonitoring, menambah data serta mengimport data usaha izin yang sudah terdaftar yaitu terdapat pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Tampilan halaman data perusahaan di Sistem Informasi Perizinan DPMPTSP

d. Tampilan halaman tambah data perusahaan

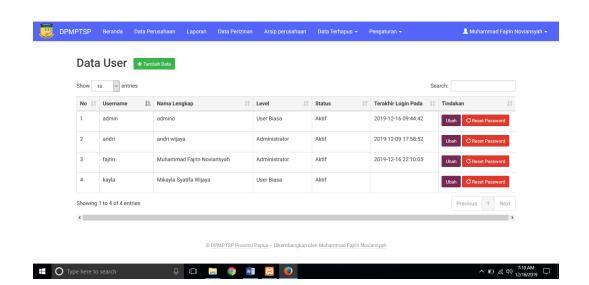
Implementasi interface halaman tambah data merupakan halaman untuk menambah atau mendaftar pembuatan izin usaha yaitu terdapat pada Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Tampilan halaman tambah data perusahaan di Sistem Informasi Perizinan DPMPTSP

e. Tampilan halaman pengaturan

Implementasi interface halaman pengaturan merupakan halaman untuk mengatur data user yaitu terdapat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Tampilan halaman pengaturan data user di Sistem Informasi Perizinan DPMPTSP

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi monitoring perijinan usaha yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

- 1. Sistem ini dapat membantu pengguna DPMPTSP yang mengajukan perijinan izin
- 2. Sistem ini dapat membantu pengguna DPMPTSP untuk memonitoring data perijinan usaha yang telah diinputkan oleh pengguna
- 3. Sistem ini dapat membantu pengguna DPMPTSP untuk mencetak laporan tiap data dari tiap ijin yang telah diajukan dan disetujui

REFERENSI

- [1] H. Yansaputra *et al.*, "Hairul, Perancangan Sistem Informasi Izin Usaha Pada Badan Perizinan, Penanaman Modal Dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 29," vol. 3, no. April, pp. 29–42, 2014.
- [2] P. Anggraini and D. P. Mulya, "Sistem Informasi Administrasi Pembuatan Surat Izin Mengemudi (Sim) Pada Kantor Kepolisian Republik Indonesia Sektor (Polsek) Pasaman Dengan Menggunakan Bahasa Pemograman Jav," J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis, vol. 1, no. 1,
- D. Dwiyantoro, "Analisis dan Evaluasi Penerapan Sistem Informasi Smart Library AMIKOM Resource Centre dengan Metode Pieces Framework," *Tik Ilmeu J. Ilmu Perpust. dan Inf.*, vol. 3, no. 2, p. 109, 2019, doi: 10.29240/tik.v3i2.962.
- [4] R. S. Dewi, R. R. Marchada, and A. Rifai, "Analisa Pieces Penerapan Digital Monitoring Informasi Penyewaan Ruko Pasar 8 Pada Pt . Alam Sutera Realty , Tbk," Semin. Nas. Teknol. Inf. dan Komun. 2016 (SENTIKA 2016), vol. 2016, no. Sentika, pp. 18–19, 2016.
- [5] <u>H. O. L. Wijaya, "Implementasi Metode Pieces Pada Analisis Website Kantor Penanaman Modal Kota Lubuklinggau," *JUSIM (Jurnal Sist. Inf. Musirawas)*, vol. 3, no. 1, pp. 46–55, 2018, doi: 10.32767/jusim.v3i1.289.</u>

ISSN: 2338-1434